

Suara Perempuan Marjinal

Kumpulan Reportase Perspektif Perempuan & Marjinal



official.aksiforjustice



official.aksiforjustice



Aksi! for Justice



aksiforjustice.id

Suara Perempuan Marjinal

Kumpulan Reportase Perspektif Perempuan dan Marjinal

Penulis

Novemy Leo
Dini Suciatingrum
Ayu Afria Ulita Ermalia
Chaerani
Sunarti Sain
Ni Luh Putu Wahyuni Sri Utami

Editor

Luviana Ariyanti
Salsabila Putri Pertiwi

Penata letak

Renie Aryandani

Diterbitkan pertama kali oleh Aksi! for gender, social, and ecological justice.
Cetakan pertama, April 2025

All rights reserved
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak tulisan dalam buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk
dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

*Publikasi ini diproduksi dengan pendanaan bersama dari Uni Eropa. Isinya sepenuhnya
merupakan tanggung jawab Aksi! dan tidak mencerminkan pandangan Uni Eropa.*

Prolog - Penyusun

Buku berjudul “*Suara Perempuan Marjinal, kumpulan Reportase Perspektif Perempuan dan Marjinal*” ini ditulis paska diselenggarakannya pelatihan jurnalistik mengenai ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan gender pada 27-29 Oktober 2024 yang diselenggarakan Aksi! for gender, social, and ecological justice dan Konde.co.

Buku ini menampilkan reportase tentang ketimpangan ekonomi yang mendorong feminisasi kemiskinan, yaitu makin banyak perempuan menjadi miskin dan sekaligus menghadapi ketidakadilan gender. Selama ini peliputan tentang feminisasi kemiskinan akibat ketimpangan ekonomi secara struktural tidak banyak menjadi perhatian publik karena lebih banyak penulis yang tertarik untuk menuliskan tentang *lifestyle* atau gaya hidup perempuan dibandingkan dengan problem perempuan miskin, problem ketimpangan perempuan yang diabaikan oleh negara

Buku ini merupakan kompilasi peliputan para jurnalis dan sejumlah aktivis perempuan dari berbagai daerah di Indonesia untuk memberikan perspektif kritis bahwa hak-hak, kepentingan dan pandangan perempuan miskin harus diperjuangkan di tengah pembangunan yang memiskinkan mereka.

Tim Editor

Kata Pengantar Aksi! for gender, social, and ecological justice

Buku **Suara Perempuan Marjinal** adalah kumpulan suara dan narasi perjuangan perempuan dari berbagai pelosok Indonesia yang mengalami ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan gender. Buku ini lahir dari kolaborasi antara Aksi! for gender, social, and ecological justice dan Konde.co. untuk *Feminist Journalism Training on Economic Inequality and Gender Injustice* tanggal 28-31 Oktober 2023 in Jakarta, ditulis oleh para jurnalis perempuan dari 12 media berbagai kota.

Di dalam buku ini pembaca akan menemui berbagai liputan tentang dampak ekonomi yang mengakibatkan feminisasi kemiskinan, yaitu perempuan seringkali menjadi yang paling terdampak dari ketidaksetaraan struktural.. Mulai dari kisah perempuan pesisir di Cilincing yang bergulat dengan proyek reklamasi, hingga kisah perempuan Bali yang menghadapi tantangan ganda dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Setiap artikel menghadirkan potret kehidupan nyata, lengkap dengan perjuangan dan harapan para perempuan untuk kehidupan yang lebih adil.

Sebagai benang merah, buku ini menyoroti bagaimana berbagai proyek pembangunan tidak jarang justru mengorbankan perempuan yang hidup di garis kemiskinan. Di saat pemerintah menjanjikan kemajuan, perempuan-perempuan ini justru kehilangan sumber kehidupan dan dipaksa beradaptasi di tengah keterbatasan. Buku ini hadir untuk mengingatkan kita semua bahwa ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan gender harus diperangi bersama, dengan menghadirkan jurnalisme yang berpihak pada keadilan sosial dan keberpihakan pada mereka yang terpinggirkan.

Kami berharap, **Suara Perempuan Marjinal** dapat menjadi bahan renungan dan inspirasi bagi semua pihak untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan di tengah ketimpangan yang masih merajalela.

Salam Adil dan Damai,

Aksi! for gender, social, and ecological justice.

Kata Pengantar Konde.co

Liputan di media kadang menggunakan sumbu pendek: tulisannya dangkal, dan yang penting cepat untuk dikonsumsi. Namun karena liputan cepat seperti ini menjadi habit yang disukai pasar, maka liputan mendalam kadang diabaikan. Padahal liputan mendalam membutuhkan banyak tenaga, kehati-hatian agar pembaca bisa melihat kedalam atau sisi lain dari sebuah peristiwa. Tentu tak mudah menyajikan isu perempuan dan kemiskinan dalam sebuah peliputan panjang, karena selama ini media masih punya kerangka: liputan dangkal dan cepat saji lebih disukai, liputan tentang life style atau gaya hidup selebritis lebih disukai, liputan tentang kemiskinan tidak disukai. Konstruksi ini sudah lama mengendap di media. Jika semua peliputan selalu menyoal selebritas dan kemapanan, isinya hanya pejabat-pejabat publik yang diwawancara, lalu kapan ada ruang untuk para perempuan di pelosok Indonesia yang selama ini tak pernah dianggap penting?

Aksi! for gender, social, and ecological justice kemudian berkolaborasi dengan Konde.co membuat sebuah pelatihan jurnalistik dan peliputan mendalam tentang isu perempuan dan kemiskinan. Sebanyak 20 jurnalis kemudian mengikuti pelatihan ini.

Peliputan ini bertujuan untuk berdiskusi, mengajak jurnalis turun ke lapangan dan menuliskan tentang konten yang banyak diabaikan. Para jurnalis diajak untuk menyusuri kota Jakarta menemui ibu-ibu pengupas kerang, sambil melihat perjuangan hidup mereka. Ada juga yang datang ke Jakarta Utara, bertemu warga yang kekurangan air dan harus membeli air bersih, padahal untuk hidup saja mereka harus mencari uang sekutu tenaga.

Lalu ada para perempuan yang tersisih dan tergusur akibat pembangunan tanggul. Pelatihan ini disajikan dalam kelas dengan para jurnalis mendiskusikan soal feminism, soal keberpihakan pada yang lemah dalam karya jurnalistik, dengan memadukan liputan ke lapangan dan kemudian menuliskannya. Proses selanjutnya adalah mempresentasikan karya jurnalistik mereka, dan bagaimana sharing pengalaman para jurnalis bertemu para perempuan narasumber di lapangan. Metode ini diyakini Aksi! for gender, social, and ecological justice dan Konde.co sebagai ruang bertemu dan memberikan ruang bagi para perempuan dan kelompok marjinal yang selama ini tersisih.

Hal lain yang dilakukan adalah pentingnya keterhubungan antara jurnalis dengan dunia fisik aktivisme dan perjuangan perempuan. Ada dunia luar biasa dari aktivisme akar rumput yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di Indonesia yang kisahnya tidak terekam. Selain itu, ada banyak perempuan yang terpinggirkan dan rentan yang hidup dalam kemiskinan dan konflik yang tidak punya akses ke dunia jurnalistik untuk menyuarakan penderitaan dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Tantangan ini menunjukkan ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memastikan ruang media bisa menjadi ruang publik yang lebih cair, transformatif dan setara. Selamat membaca tulisan hasil peliputan mendalam para jurnalis yang terekam dalam buku ini!

Luviana Ariyanti

Pemimpin Redaksi Konde.co

Daftar Isi

Prolog - Penyusun.....	i
Kata Pengantar Aksi! for gender, social, and ecological justice.....	ii
Kata Pengantar Konde.co.....	iii
Daftar Isi.....	iv
<i>Novemy Leo</i> - Upah Murah Hingga Sengkarut Limbah Kerang: Nasib Masyarakat Nelayan di Tengah Proyek Reklamasi Cilincing.....	1
<i>Dini Suciatiningrum</i> - Asa Wulan, Gadis Pengupas Kerang di Jakut di Tengah Kemegahan Ibu Kota.....	12
<i>Dini Suciatiningrum</i> - Perempuan di Atas Lautan Kerang Jakut, Lekat Bau Anyir demi Kehidupan.....	17
<i>Dini Suciatiningrum</i> - Suarakan Perempuan Miskin dan Terpinggirkan Lewat Jurnalistik Feminis.....	22
<i>Ayu Afria Ulita Ermalia</i> - Beban Kerja Perempuan Bali di Kala Hujan Berlipat Ganda.....	27
<i>Chaerani</i> - Kemegahan Makassar New Port Hilangkan Ruang Hidup, Lahirkan Kemiskinan Nelayan Perempuan.....	29
<i>Sunarti Sain</i> - Makassar New Port, Proyek Raksasa yang Menghilangkan Hak Masyarakat Pesisir dan Memiskinkan Nelayan Perempuan.....	39
<i>Ni Luh Putu Wahyuni Sri Utami</i> - Puluhan Tahun Sulit Akses Air, Perempuan di Kedisan Mulai Bergerak.....	43
Tentang Penulis.....	47

Upah Murah Hingga Sengkarut Limbah Kerang: Nasib Masyarakat Nelayan di Tengah Proyek Reklamasi Cilincing

Mbah Ceni dan para perempuan pengupas kerang hijau di kawasan Proyek Reklamasi Tanggul Cilincing, Jakarta Utara, bergulat dengan kesulitan ekonomi.

Novemy Leo

Mbah Ceni (72 tahun) duduk di antara para pekerja laki-laki dan perempuan muda hingga dewasa. Perempuan itu telah sekitar 20-an tahun menggeluti pekerjaan sebagai pembersih kerang hijau. Usianya tak lagi muda, bahkan kini dia sudah memiliki tiga cucu dan tiga cicit.

Mbah Ceni adalah satu dari ratusan perempuan yang menghabiskan hidupnya bekerja selama tujuh jam sehari sebagai pembersih, perebus, dan pengupas kerang hijau. Kami menemuinya di RW 1, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Saat ditemui hari itu, Mbah Ceni sedang membersihkan kerang di sebuah rumah pondok, tepat di samping tembok penahan Proyek Reklamasi Pantai Cilincing.

Anak tunggalnya, Komariah, selalu ikut bekerja, duduk tepat di sampingnya setiap hari. Kedua perempuan itu selalu bersama-sama dan berbagi peran, saling menyokong untuk bisa menyelesaikan pekerjaan mengupas ribuan kerang setiap hari.

Tangan keriput Mbah Ceni sangat cekatan membersihkan kerang yang ditumbuhi parasit dan tumbuhan lainnya. Dibandingkan Komariah, gerakan Mbah Ceni membersihkan kulit kerang tak lagi lincah. Namun hal itu tak menyurutkan semangat Mbah Ceni untuk bisa membawa pulang uang hari itu.

Kehidupan Mbah Ceni dan Keluarga

Mbah Ceni pagi itu terlihat mahir menggunakan pisau *cutter* dan tambahan pisau khusus untuk membersihkan kerang. Tumpukan kerang yang baru dituang ke tanah dari sebuah boks plastik oleh seorang laki-laki tepat di depannya itu langsung diambilnya. Diletakkan di depannya, lalu satu per satu kerang itu dibersihkan dengan pisau *cutter*.

Kerang yang sudah dibersihkannya itu kemudian ditaruhnya ke dalam boks plastik tadi. Dalam waktu tujuh jam—sejak jam 10.00 WIB hingga 17.00 WIB—Mbah Ceni berjuang untuk mendapatkan Rp20.000,- hingga Rp25.000,- per hari dari hasil pembersihan kerang itu.

“Uangnya saya pakai untuk membeli beras dan keperluan saya dan keluarga lainnya. Saya tinggal bareng anak saya sejak suami meninggal dunia puluhan tahun lalu,” ungkapnya.

Dengan usianya yang tidak muda lagi, Mbah Ceni sering diminta anaknya untuk tidak lagi bekerja membersihkan kerang. Namun mbah Ceni tak mengindahkannya. Keras kepala, Mbah Ceni tidak ingin dirinya menjadi beban keluarga. Paling tidak hasil yang diperolehnya setiap hari bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Disuruh anak di rumah saja, saya *nggak* mau. Habis di rumah tidur melulu, kalau di sini *mah* ada dapat Rp10.000,-, Rp20.000,- untuk beli beras, dan lainnya. Dapat di sini buat makan saja, ya Allah, sudah cukup,” kata perempuan yang menutup kepalanya dengan kain itu.

Setiap hari, perempuan yang hari itu mengenakan celana kulot warna coklat dan blus motif warna biru tersebut membawa makanan dari rumah untuk bekal makan siang. Nasi dan sayur, itulah makanan sehari-hari Mbah Ceni. Ia baru absen bekerja ketika jatuh sakit, demam contohnya.

Memakai kalung dan anting-anting emas, Mbah Ceni mengatakan, itu adalah salah satu barang peninggalan dari orang tuanya yang masih ia simpan hingga saat ini. “Ini dari orangtua, harus dijaga,” katanya.

Semasa kecil, Mbah Ceni hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 2 Sekolah Dasar (SD). Mau melanjutkan pendidikan, orang tuanya tak sanggup membiayai pendidikannya.

Begitulah sebagian potret ekonomi perempuan di Cilincing: tak mau duduk diam berpangku tangan. Apa pun dikerjakan sesuai kemampuan dan kapasitasnya. Meski hanya bisa mendapatkan sedikit uang setiap hari, para perempuan itu bekerja untuk terus menopang kehidupan keluarganya.

Cerita Anti, Banting Tulang Kupas Kerang Demi Upah Harian

Lain lagi cerita Anti (33 tahun). Sejak usia 5 tahun, dia sudah diperkenalkan tentang kerang hijau oleh ibu dan neneknya. Bahkan, ibu satu anak ini juga ikut membersihkan dan mengupas kerang bersama ibu dan neneknya. Memori dan kenangan masa kecil itu terus dilakoninya.

“Saya lupa berapa ongkos membersihkan dan mengupas kerang saat itu. Mungkin Rp5.000,- untuk borongan, tapi sekarang sudah Rp3.000,- per kg,” katanya.

Saat ditemui, Anti bersama tiga warga lainnya sedang mengupas kerang yang baru selesai direbus. Kerang hijau yang masih mengeluarkan asap itu ditumpuk di depannya. Menggunakan pisau *cutter* kecil yang dipegang dengan tangan kanannya, Anti mengambil satu per satu kerang dengan tangan kiri. Kerang itu dicungkil di bagian pinggirnya, lalu isinya dikeluarkan dan ditampung di dalam bokor plastik kecil yang di atasnya sudah ditaruh plastik berukuran sedang berwarna merah.

Dulu, membersihkan kerang dihargai Rp7.000,- per kotak plastik ukuran 80 cm x 20 cm, dengan tinggi sekitar 10 cm. Tapi sejak tahun 2000, harga membersihkan kulit kerang menjadi Rp10.000,- per kotak plastik. Sedangkan harga mengupas kerang yang sudah direbus dan diambil isinya itu sebesar Rp3.000,- per kg.

“Sehari saya bisa bawa pulang uang Rp50.000,-,” katanya.

Anti masih tinggal di rumah orangtuanya. Setiap hari, ia keluar rumah dari jam 10.00 WIB hingga Maghrib, meninggalkan suami dan anak balitanya, demi mencukupi kebutuhan keluarganya.

Anti bisa membawa pulang uang sekitar Rp50.000,- karena setiap hari hanya mampu mengupas kerang sekitar 16 kg untuk diambil isinya. Uang tersebut digunakan untuk membeli beras, gula, kopi, plus sebatang rokok untuk suaminya.

Suami Anti, Rahman, tak membantunya kerja sebagai pengupas kerang karena Anti tak mengizinkannya. Bukan hanya agar suaminya bisa fokus memperhatikan anak mereka yang masih balita. Namun ada alasan lainnya, yakni agar penghasilannya setiap hari tidak kurang dari angka yang biasa didapatkannya.

“Suami jagain anak yang masih kecil karena suami belum biasa megang *kek* gini (mengupas kerang). Kalau kerja begini, dia dapatnya sedikit. Mending dia yang di rumah, Alhamdulillah dia *nggak* complain,” Anti memberi alasan.

Sebelumnya suami Anti pernah bekerja di pabrik Elpiji Gas, tetapi berhenti pada saat Covid-19. Anti pun pernah bekerja di pabrik konveksi, lalu memilih berhenti karena gajinya yang sebulan sekali itu tak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Buat hari-hari *nggak* ada. Kalau ini (mengupas kerang) setiap hari ada pemasukan meski sedikit. Kita kan butuhnya harian,” jelasnya.

Selama ini Anti tak pernah mendapat bantuan pemerintah. Anti yang masuk dalam Kartu Keluarga (KK) suami di Koja itu tak tahu alasan dirinya tak mendapat bantuan. Oleh karena itu, tak ada pilihan selain bekerja bagi Anti.

“Kalau ada pilihan, siapa *sih* yang mau *kek* begini? Kita juga penginnya ya enak lah, *nggak* ada yang mau hidup susah. Tapi, kita syukurin saja daripada *nggak* ada pemasukan, mau makan dari mana?” Kata perempuan berbaju kaos hitam dan celana kain warna coklat ini.

Sesekali Anti membantu orangtuanya yang kini sudah menjadi pedagang setelah beberapa tahun menjadi pembersih kerang juga.

“Dulu orang tua kerjanya *kek* gini. Sekarang mereka sudah jadi pedagang. Nanti kalau saya bantu orang tua, uang yang saya dapat untuk jajan anak. Lumayan. Apa saja akan saya kerjakan, yang penting halal,” katanya.

Perempuan di Kawasan Tangkul Berdagang Es Teh Hingga Jual Aset Perahu

Tak hanya menjadi pembersih dan pengupas kerang, perempuan di pesisir Pantai Cilincing itu juga banyak melakukan berbagai pekerjaan lain. Seperti Suryani (44 tahun), yang memilih menjadi pedagang es teh dan gorengan untuk menambah pemasukan keluarga. Penghasilannya rata-rata Rp100.000,- per hari.

“Saat Covid-19, ‘*nggak* ada kerjaan, *ngapain* ya?’ Pertama saya jualan agar-agar, membantu keponakan. Karena di sini ramai orang olahraga, lalu saya bikin bihun dan kemudian bikin gorengan dan es teh,” kata perempuan berbaju kaos merah muda ini saat ditemui di tempat usaha suaminya. “Hasilnya lumayan, rata-rata Rp100.000,- per hari.”

Suami Suryani bekerja serabutan sebagai nelayan, pengrajin kulit kerang, juga buruh. Menurutnya, sang suami sudah hampir 2 bulan *off* melaut karena ada proyek tanggul. “Sesekali membuat sampel kerajinan dari kulit kerang,” katanya.

Suaminya memiliki tempat usaha kerajinan kerang bernama Pusat Kerajinan Kerang ‘Cangkring’. Tempat usaha berukuran 3x3 meter itu ada di tengah lokasi pembersihan, perebusan, dan pengupasan kerang.

Usaha kerajinan kulit kerang itu baru delapan bulan beroperasi. Produksinya seperti lampu hias, pigura, hiasan dinding, yang semua bahan dasarnya terbuat dari kulit kerang. Ada juga produk pasir halus dan pasir kasar yang terbuat dari bahan kulit kerang.

Selain Suryani, perempuan lain yang juga kreatif menangkap peluang ekonomi di wilayah itu adalah Masturo (58 tahun). Sejak beberapa tahun ini Masturo berjualan keripik ubi dan es teh.

Keripik ubi yang dijualnya itu dibeli oleh suaminya di pasar. Lalu ketika sampai ke tangan Masturo, keripik ubi berwarna kuning itu dibumbui kembali dengan bumbu ‘rahasia’ dan dijemur lalu digoreng dan dijual. Masturo belum bisa membuat keripik ubi sendiri sehingga ia membeli yang sudah jadi, kemudian diolahnya kembali.

“Saya belum tahu rahasianya untuk bikin keripik ini. Jadi saya beli sayur kerupuk yang sudah jadi lalu saya bumbui kembali dan jual,” katanya.

Ibu beranak empat ini menjajakan jualannya di bawah pohon ceri atau kersen, tak jauh dari rumahnya. Sasarannya adalah para pekerja kerang, mulai dari tukang ojek, pembersih dan perebus, serta pengupas kerang. Termasuk pada pekerja proyek reklamasi pantai yang hilir mudik di wilayah itu.

Es teh dijualnya seharga Rp1.000,- sedangkan keripik seharga Rp2.500,-. “Pagi jam setengah tiga, saya sudah buka jualan, tutupnya Maghrib. Alhamdulilah setiap hari kalau laris saya bisa dapat Rp100.000,-,” kata nenek empat cucu ini. Anak-anak Masturo bersekolah hingga SMA dan kini bekerja serabutan.

Sementara itu, suami Masturo adalah penarik becak. Setiap hari laki-laki itu membawa pulang uang sebesar Rp50.000,- untukistrinya.

“Tak mengapa, itu rezeki,” katanya yang ditemui saat menjemur keripiknya di bawah tembok tanggul.

Suami Masturo dulu adalah nelayan kerang atau penyelam, bahkan juga memiliki perahu. Namun perahunya sudah dijual sejak dia tak bisa lagi menyelam. “Sudah tua dia, tidak bisa lagi *nyelulup* (nyelam),” kata Masturo. Usai menjual perahu, mereka pun membeli becak.

Masturo punya pemikiran sendiri tentang proyek tanggul pantai di kawasan Cilincing. Menurutnya, proyek tersebut membantu masyarakat di sana, khususnya yang ditinggal di pesisir pantai.

“Pembangunan *nggak* apa-apa. Malah enak, karena biasanya ombak sampai ke halaman rumah. Rumah pernah terendam air. Dulu waktu kecil saya pernah digotong waktu banjir, ombaknya bikin maju rumah,” kata Masturo, yang juga adalah anak nelayan. “Tapi sekarang sudah ada tembok penahan banjir sehingga kami sekarang aman.”

Perempuan lainnya yang juga menangkap peluang ekonomi di Cilincing adalah Nurvadila (42 tahun). Ibu beranak lima ini telah ditinggal cerai suaminya yang membawa dua anak, sedangkan dirinya kini tinggal bersama tiga anaknya.

Untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anaknya yang masih duduk di bangku kelas 5 SD, Nurvadila membuka warung darurat di dekat tambatan perahu nelayan.

Warga RT 10 / RW 1 ini setiap pukul 05.00 WIB membawa barang jualannya ke warung dengan menumpang becak; ongkosnya Rp15.000,- sekali jalan.

Pukul 05.30 WIB, berbagai dagangannya sudah tersedia. Mulai dari lontong seharga Rp2.000,-, telur asin Rp5.000,-, gorengan Rp1.000,-, mie rebus Rp5.000,-, dan es teh Rp2.000,-.

“Semua nelayan dan ojek kerang beli makan minum di sini, harganya murah. Saya jualan makanan hingga Ashar,” kata Nurvadila.

Ojek Kerang, Lapangan Kerja Baru Imbas Penimbunan Bibir Pantai

Ribuan kerang hijau yang diolah oleh Mbah Ceni, Anti, serta para perempuan dan anak di wilayah itu, berasal dari perairan Cilincing, Jakarta Utara. Kerang itu adalah hasil panen nelayan atau penyelam setempat. Kerang-kerang tersebut diangkut dari ‘kolam’ pantai atau tambatan perahu, sekitar 50 meter dari lokasi pembersihan dan perebusan kerang.

Dulu, kerang-kerang diturunkan dari perahu nelayan yang langsung berada di pinggir pantai. Para pekerja pembersih, perebus, dan pengupas kerang sudah menunggu tak jauh dari pantai. Kemudian kerang itu diambil dan mulai dibersihkan, direbus, lalu dikupas di sana. Tapi sejak pelaksanaan proyek tanggul sekitar tahun 2021 lalu, kini tak ada lagi bibir pantai karena sudah ditimbun untuk proyek tersebut. Tambatan perahu dibuatkan sebagai ‘parkiran’ perahu nelayan.

Para warga laki-laki di wilayah itu mengangkut kerang ke tempat pengolahan dengan sepeda motor. Jauhnya jarak antara tambatan perahu dengan lokasi pengelolaan kerang ini membuat masyarakat menciptakan lapangan kerja: ojek kerang.

Ojek-ojek motor sudah menyiapkan sepeda motor mereka di sana sejak pagi. Satu sepeda motor bisa mengangkut 2 kuintal atau 200 kg kerang yang dimasukkan dalam karung oleh nelayan. Karung-karung yang sudah berisi kerang itu diikat di bagian atasnya dan siap untuk diangkut.

Haryono (49 tahun), ayah dua anak, sudah menekuni pekerjaanya sebagai ojek kerang sejak tahun 2021. Dalam sehari Haryono bisa puluhan kali bolak-balik mengangkut karung berisi kerang dari tambatan perahu ke lokasi pengelolaan kerang.

Menggunakan sepeda motor Yamaha DH 3734 HHG yang dibelinya sejak tahun 2014, Haryono menghasilkan Rp100.000,- per hari. Dua karung beras berisi kerang ditaruh di jok belakang, dua karung lainnya diletakkan di bagian depan tempat duduk sepeda motornya.

Haryono yang terhimpit di antara karung-karung kerang itu dengan santai melajukan sepeda motornya sejak pukul 07.00 hingga pukul 16.00. Kecepatannya juga tinggi.

“Sepeda motor ini sangat kuat, dia selalu meneman dan membantu saya untuk membawa karung-karung kerang ini,” katanya, Senin (30/10) sambil mengusap jok sepeda motornya.

Malang Proyek Tanggul: Produksi Kerang Berkurang, Pantai pun Hilang

Di sisi lain, dampak negatif pun dirasakan masyarakat dengan adanya pembangunan proyek tanggul raksasa itu. Tak gampang memanen kerang setiap hari, apa lagi sekarang. Para pemilik perahu dan nelayan mesti berputar untuk bisa menembus lautan agar sampai ke bagian mereka. Bahkan hasil produksi kerang pun saat ini mulai berkurang. Pun jika produksi masih ada, hasil dan kualitasnya tak lagi sama seperti dulu. Menurut sejumlah nelayan, hal ini terjadi akibat pembangunan proyek tanggul.

Sejumlah masyarakat nelayan dan penyelam sangat menginginkan bantuan alat tangkap perahu ataupun alat selam. Hal ini agar bisa meningkatkan pekerjaan mereka, yang kemudian juga meningkatkan taraf hidup.

“Jika berkenan, pemerintah bisa memberikan bantuan alat tangkap kepada nelayan di sini. Kami ingin ada alat tangkap ikan dan kerang. Ada kompresor, tali blewang, bambu buat penumbuhan kerang hijau. Juga ada alat selam yang lebih baik,” harap Hasan, Senin (30/10).

Ayah dua anak ini kami temui saat sedang membeli es teh warung darurat milik Nurvadila, yang ada di samping tambatan perahu. “Setiap hari saya minum es teh tiga kali,” kata Hasan.

Hasan juga mengeluhkan adanya limbah dari sejumlah perusahaan. Akibatnya, banyak kerang yang dibudidaya mati dan rusak. Bahkan ada juga produksi kerang berukuran besar yang tidak lagi maksimal.

Dulu, Hasan adalah seorang nelayan. Namun kini dia menjadi buruh perahu, mengangkat kerang hasil panen dari atas perahu dan memasukkannya ke dalam karung berisi kerang yang kemudian akan dibawa ke tempat pengelolaannya.

Hasan kerja sejak pagi, dari pukul 7 pagi hingga 7 malam. “Seratus ribu saya dibayar setiap hari. Untuk saya pakai beli beras, sama biaya anak sekolah,” katanya. Hasan mengaku tak bisa melakukan pekerjaan selain menjadi nelayan atau buruh perahu.

“Cocoknya di sini *doang*. Dipindahin ke tempat lain *nggak* bisa karena jiwa saya sudah di sini,” jelasnya.

Warga masyarakat lainnya merindukan kondisi Cilincing seperti dulu sebelum pembangunan tanggul. Mereka ingin melihat pantai, bermain di pinggir pantai, berlarian, dan berjalan di pasir pantai. Ika Anggriani (38 tahun), mengaku sangat merindukan Pantai Cilincing yang dulu.

“Dulu, saat kecil saya masih bisa main air di pesisir pantai, berjalan di pasir pantai. Sekarang, mau lihat pantai saja mesti berjalan jauh dan sudah tidak ada lagi pasir seperti dulu. Saya merindukan suasana itu,” kata Ika.

Masalah Limbah Kerang yang Tak Terselesaikan

Cilincing, salah satu wilayah pesisir utara Jakarta, memang sangat jauh dari gambaran kemewahan hidup Ibu Kota Republik Indonesia itu. Ratusan Kepala Keluarga (KK) di sana masih hidup dalam ketidakpastian ekonomi dan masa depan, khususnya perempuan dan anak.

Bagaimana tidak? Sebagian besar masyarakatnya masih bekerja sebagai nelayan kerang yang tidak didukung dengan sarana prasarana dan fasilitas serta edukasi yang memadai. Hasil produksi dan pengrajaan kerang pun masih dijual dengan harga murah.

Apa lagi, proyek reklamasi Teluk Utara Jakarta itu juga mempersempit ruang gerak nelayan. Kapal nelayan harus berputar jauh akibat pembangunan; konsekuensinya berimbas pada biaya operasional kapal saat melaut. Belum lagi pertimbangan dari segi waktu untuk menjangkau bagan dan kembali ke tambatan perahu.

Kerang yang diolah di Cilincing umumnya didatangkan nelayan dari wilayah pesisir Jakarta Utara, Dadap, Banten, dan Cirebon. Setelah itu dijual ke Pasar Muara Angke, Pasar Muara Baru, serta tempat lainnya.

Di satu sisi, kerang hijau bisa meningkatkan ekonomi nelayan dan para pelaku ekonomi lainnya. Namun ada persoalan yang kini harus diperhatikan pemerintah dan semua pihak, yakni limbah kerang.

Usai isi kerang diambil, kulitnya ditumpuk dan dibuang di sepanjang lokasi pengelolaan. Terpantau pada Senin (30/10) siang, limbah kerang hijau yang termasuk kelas *Pelecypoda* itu berceceran di lokasi pengelolaan kerang, sekitar 50 meter dari tambatan perahu nelayan. Bau menyengat pun tercipta dari tumpukan limbah kerang yang belum kering. Salah-salah, orang yang baru datang dan melewati tempat itu bisa langsung mual, bahkan muntah karena

aroma tak sedap tersebut. Selain buruk secara pemandangan, kondisi ini pun mengganggu Kesehatan.

Aparat pemerintah setempat mestinya berperan untuk mengatasi sampah limbah kerang di wilayah Cilincing, tepatnya di RW 1 itu. Ketua RT 5 / RW 1 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Winaryo, juga menyoroti persoalan itu. Menurutnya, persoalan limbah kerang sudah lama terjadi di wilayah itu, tapi belum bisa diatasi hingga saat ini.

Hampir sebagian besar masyarakat RW 1 bekerja sebagai nelayan, ojek kerang, dan pembersih kerang sejak puluhan tahun silam. Menurut Winaryo, limbah kerang yang dibuang masyarakat dan pengusaha kerang di sekitar tempat pengolahan kerang itu tidak semata terjadi karena kesalahan mereka. Bukan membela masyarakatnya; ia mengatakan, kondisi itu terjadi juga salah satunya karena ketiadaan tempat sampah di wilayah itu sejak bertahun-tahun. Selain itu, ada ketidaksadaran masyarakat, khususnya pengusaha kerang, untuk disiplin membuang limbah di tempat semestinya.

Saat ditemui di kediamannya pada Senin siang, Winaryo mengaku sulitnya mengatasi masalah limbah di wilayahnya itu lantaran ia sudah berulang kali menyampaikan permintaan masyarakat untuk menghadirkan tempat sampah ke lurah dan camat setempat. Namun hasilnya tak ada.

“Pertemuannya sudah lama sekali. Sudah bertahun-tahun kami tidak punya tempat sampah, tapi tidak pernah diberikan,” katanya. Padahal, fasilitas umum seperti tempat sampah harusnya ada di sana sehingga limbah kerang tidak bertumpuk.

Didampingi istrinya, Winaryo juga menilai, pengusaha kerang belum sadar akan kebersihan karena membuang limbah kerang begitu saja. Turnya, meski tempat sampah dari pemerintah belum ada, sekitar 6 tahun lalu pihak PT WIKA telah menghadirkan tempat sampah sementara berupa kontainer di wilayah itu.

“Cuma masyarakatnya, pengusaha, tidak disiplin. Bandel juga, tidak mau membuang sampah pada tempatnya, padahal lokasinya dekat. Ini persoalan kami di sini yang belum bisa diatasi sampai sekarang,” katanya.

Persoalan sampah di DKI Jakarta memang belum bisa ditangani, sebagaimana di wilayah Cilincing. Meski tempat sampah sudah tersedia, masyarakat enggan membuang sampah industriya di sana. Oleh karena itu, Winaryo mengimbau masyarakat, khususnya pengusaha kerang, untuk bisa lebih disiplin dalam menampung dan membuang sampah kulit kerang itu pada tempatnya. Ia juga berharap pemerintah tingkat atas bisa memanfaatkan potensi kulit kerang di Cilincing itu untuk diolah menjadi kerajinan demi meningkatkan ekonomi masyarakat. “Agar ada pemberdayaan ekonomi di sini. Daging

kerangnya dijual, limbah kerangnya juga bisa menghasilkan sesuatu yang berharga,” harap Winaryo.

Solusi untuk Cilincing

Sebagai wilayah pengolahan kerang, Cilincing sesungguhnya memiliki beberapa persoalan yang penting untuk dicarikan solusi. Antara lain tentang limbah kerang dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pengamat lingkungan sekaligus dosen Geografi FKIP Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Hamzah H. Wulakada, ikut mengomentari persoalan tersebut. Hamzah mengatakan, dilihat dari regulasinya, memang rencana untuk pengembangan ruang apa pun intervensinya seyogyanya harus ada dokumen lingkungan yang mendahului. Minimal, perubahan zona sudah tersedia.

“Sayangnya, kemudian ini kalau proyek pemerintah, maka beberapa langkah yang dilakukan juga perlu bijak. Jadi tidak hanya mempertimbangkan masalah fisika, kimia maupun masalah fisiknya. Namun juga masalah sosial ekonomi itu yang lebih sulit justru untuk dipotret,” kata Hamzah, Senin (30/10) malam.

Pada perencanaan awal potret soal kondisi sistem sosial ekonomi masyarakat dengan pola budaya hidup pesisir, wilayah itu terkategori kawasan lindung. Artinya, perlakuannya juga harus berbeda. Kemudian, persoalan usaha pengelolaan kerang sebenarnya tidak susah karena sudah ada aktivitas masyarakat di sana sejak awal. Setidaknya, harus ada intervensi program lain yang menyertainya.

Dengan kata lain, justru usaha kerang adalah fungsi pengawasan untuk batas maksimal usahanya. Banyaknya bawaan limbah yang dihasilkan itu, harus ada fasilitas kegiatan produksi lain yang menyertai, sehingga tidak menimbulkan limbah.

“Banyak itu teknik untuk mendaur ulang limbah kulit kerang. Kalau hanya sebatas penyediaan dan penampungan limbah kerang, saya kira itu tidak menyelesaikan masalah limbah kerang di sana,” kata Hamzah.

Lanjutnya, alih-alih diminta menghentikan usaha mereka, masyarakat harus difasilitasi. Mesti ada intervensi teknologi dalam aktivitas usaha dan pengelolaan limbahnya. Hal itu harus diakomodir dalam sebuah kebijakan untuk usaha yang sekaligus mencegah kerusakan lingkungan.

Hamzah menilai, ada dua kemungkinan tujuan kebijakan pemerintah membangun tanggul di Cilincing. Yakni untuk memproyeksi sampah dari daratan agar tidak langsung

berinteraksi atau mencemari laut. Kedua, memberikan perlindungan untuk memastikan kehidupan biota laut di pesisir itu aman dari gangguan kehidupan di darat.

Hamzah menyarankan agar tujuan pembangunan tanggul dijelaskan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan polemik. “Apakah kehadiran proyek itu menimbulkan manfaat atau dampak negatif bagi masyarakat dan mesti dicari jalan keluarnya,” katanya.

Menurutnya, harus ada solusi yang baik sehingga masyarakat tidak dirugikan dan penghidupan mereka secara ekonomi bisa tertopang. “Kita *nggak* mungkin bongkar lagi itu, pastinya. Yang paling mungkin adalah diintervensi kebijakan lanjutan, yaitu rehabilitasi habitat pesisir untuk kehidupan kerang dan lainnya di wilayah pesisir itu, dengan intervensi lain yang mungkin lebih ramah lingkungan,” sarannya.

Solusi lainnya, mengedukasi masyarakat dan mengintervensi kebijakan untuk hidupkan perekonomian masyarakat. Dari pengolahan kerang sampai dengan daur ulang limbah, hal itu mungkin bisa mengubah perilaku masyarakat.

“Kita *nggak* bisa langsung menyalahkan masyarakatnya karena mereka mengalami keterbatasan fasilitas dan lainnya,” kata Hamzah. Masyarakat harus difasilitasi untuk dapat mendaur-ulang limbah kerang. “Siapkan teknologi dan siapkan pasar agar limbah kerang tak lagi terbuang ke laut dan kehidupan ekonomi masyarakat bisa lebih meningkat setiap waktu,” ia menyarankan.

Asa Wulan, Gadis Pengupas Kerang di Jakut di Tengah Kemegahan Ibu Kota

Saat perempuan harus memendam impian.

Dini Suciatingrum



Perempuan pengupas kerang di Muara Angke, Jakarta Utara, Senin (30/10/2023). (IDN Times/Dini Suciatingrum)

Aroma amis meriap menusuk hidung saat kami membuka pintu mobil yang terparkir sebuah gang di Kampung Kerang Hijau, RT 6 RW 22, Penjaringan Jakarta Utara, Senin (30/10/2023).

Tidak butuh waktu lama, seluruh badan seketika terasuki bau tidak sedap. Suara renyah dari cangkang kerang hijau yang remuk saat kaki menapaki lebih dalam kampung seolah membuat irama selamat datang.

Beberapa kali, kaki saya tertusuk remukan cangkang kerang yang menyelinap di antara jari kaki yang beralaskan sandal. Namun, lima anak kecil yang berlari tertawa di atas lautan limbah kerang yang menjadi daratan, seakan tidak jadi persoalan. Termasuk bagi Rizki, anak yang berusia dua tahun ini bahkan tanpa alas kaki bermain di belakang rumah yang sudah berserakan kerang.

Wulan Terpaksa Memendam Cita-Cita



(IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Tidak lama, seorang gadis mendatangi Rizki. Dia dengan cekatan melepas popok Rizki yang sudah penuh kotoran. Gadis yang akrab panggil Wulan ini kemudian memandikan adiknya di atas tumpukan kerang. Kamar mandi yang ada memang jauh dari kata layak, tidak beratap hanya tertutup tirai yang sudah kumuh.

Wulan tiba-tiba menghentikan guyuran air yang membasahi adiknya saat saya menanyakan cita-cita Wulan.

"Saya inginnya sih ya supaya (keluarga) enak dipandang, sukses pokoknya lah," ujar Wulan.

Masa Anak-Anak Jadi Pengupas Kerang



(IDN Times/Dini Suciatingrum)

Besar di keluarga nelayan, membuat Wulan tidak bisa melewatkkan masa kecil anak-anak yang menyenangkan. Dia menceritakan sejak duduk di bangku Sekolah Dasar sudah membantu orang tuanya mengupas kerang.

Ya, Ibu Wulan merupakan perempuan pengupas kerang di menggantungkan hidupnya dengan hasil melaut sang ayah.

"Sejak kecil sudah (kupas kerang), saat pulang sekolah sampai sore, sekarang juga masih," katanya.

Wulan Ingin Mengecap Bangku Kuliah



(IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Keinginan Wulan untuk mengecap perguruan tinggi juga harus dia pendam. Wulan memilih untuk membantu mencari uang dengan mengupas kerang hijau.

"Ada sih (Keinginan kuliah), tapi..." ucapnya lirih dan terhenti.

Saat ini Wulan hanya ingin membantu orangtuanya dan bisa memperbaiki rumah, sebab saat ini rumahnya terancam tenggelam karena berada di pinggir pantai.

Pembangunan Tanggul Buat Takut Tergusur



(IDN Times/Dini Suciatingrum)

Pembangunan tanggul di pantai di pesisir Jakarta juga membuat Wulan kalut. Dia takut apabila hunian yang jadi tempat berlindung selama 14 tahun tersebut digusur yang berdampak juga kehilangan mata pencahariannya.

"Saya ingin perbaiki rumah dan lingkungannya saja jangan digusur," katanya.

Seperti diketahui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026, berencana membangun tanggul pantai sepanjang 22 km. Pembangunan tanggul pengamanan ini termasuk salah satu bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang berperan dalam upaya penanggulangan banjir.

Apabila mengacu pada grafik NCICD milik Dinas SDA DKI Jakarta, total panjang tanggul yang sudah terbangun sepanjang 8.043 meter, yang terbagi ke dalam beberapa klaster: Marunda, Muara Baru, Pantai Mutiara Daratan, Muara Angke, Pluit, dan Pantai Indah Kapuk.

Perempuan di Atas Lautan Kerang Jakut, Lekat Bau Anyir demi Kehidupan

Kehidupan keras perempuan pengupas kerang di Ibu Kota

Dini Suciatiningrum



Perempuan pengupas kerang di Muara Angke, Jakarta Utara, Senin (30/10/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

"Kruk-kruk" suara dari cangkang kerang hijau yang remuk saat terinjak terdengar renyah seolah menyambut langkah kaki saya memasuki Kampung Kerang Hijau, RT 6 RW 22, Penjaringan Jakarta Utara, Senin (30/10/2023).

Sepanjang mata memandang, tidak ada tanah atau plester beton hanya limbah kerang hijau yang bertumpuk sampai remuk jadi daratan bagi warga Kampung Kerang.

Di lokasi pengupasan kerang, banyak drum-drum perebus kerang yang mengepul. Nampak wajah dua laki-laki penjaga tungku menahan pijaran tungku perebus. Tidak jauh, puluhan ibu-ibu berjejer dengan tumpukan kerang yang menggunung. Mereka seolah berlomba untuk mengeluarkan isian kerang. Tanpa kata, hanya tangannya yang bekerja.

Terbiasa dengan Kepungan Lalat



(IDN Times/Dini Suciatingrum)

Jari jemari Siti Julaeha nampak terampil memisahkan kerang dari cangkangnya. Mata perempuan pengupas kerang tersebut sesekali melirik anaknya Syifa (3) yang bermain balon. Seolah sudah akrab dengan dengung kepak sayap lalat yang berada setiap sudut, Siti tetap giat mengupas kerang.

"Kupas ini harus cepat kalau lambat tidak dapat duit," ujar Siti sambil terus mengupas.

Penghasilan Satu Hari Rp70 Ribu Sampai Rp80 Ribu



(IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Siti mengatakan dia sudah menjadi pengupas kerang sejak tahun 2010. Dalam satu hari dia bisa mengupas satu sampai dua drum yang berisi kerang hijau. Satu drum, Siti mendapatkan upah Rp40 ribu.

"Sehari bisa dapat Rp70 ribu sampai Rp80 ribu. Biasanya mulai pagi sekitar jam 09.00 sampai petang," paparnya.

Bersyukur Meski Badan Pegal Tidak Dirasa



(IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Rasa nyeri pinggang yang kerap menghampiri Siti tak pernah dirasakan. Dia harus duduk dari pagi sampai petang agar bisa mendapat kupasan kerang banyak agar dapur tetap ngebul.

Suami Siti, merupakan pedagang ikan, namun penghasilannya juga tidak menentu. Siti mengaku tidak jenuh hampir tiap hari mengupas kerang, sebaliknya dia bersyukur meski hanya memakai daster setiap hari dan berbau amis asal bisa mendapatkan uang untuk membayar kebutuhan hidup yang semakin mencekik.

"Gak pernah jalan-jalan, libur, yang penting bisa kupas kerang tiap hari sudah bersyukur," katanya.

Kehidupan Pengupas Kerang Tidak Terhempas Saat Ada Pembangunan Tanggul



(IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Beban Siti seolah semakin berat, tidak hanya huniannya yang hampir tenggelam karena berada di pesisir pantai Jakarta, namun juga tidak bisa akses air bersih yang merupakan sumber kehidupan.

Siti merinci dalam satu bulan dia membeli air untuk mencuci dan mandi sebesar Rp200 ribu, sementara air minum dua membeli galon isi ulang Rp300 ribu dalam satu bulan.

"Tiap habis (air) saya dorong sendiri ke pangkalan beli enam blong (jerigen) Rp15 ribu. Air ini untuk nyuci, mandi tapi kalau minum beli sendiri," katanya.

Bagi perempuan berusia 36 tahun ini, bau anyir kerang merupakan cuan yang jadi nafas kehidupan lebih baik. Dia berharap kehidupan pengupas kerang tak terhempas seiring pembangunan tanggul program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Joko Widodo.

Suarakan Perempuan Miskin dan Terpinggirkan Lewat Jurnalistik Feminis

Ketidakadilan gender jadi prioritas di ruang-ruang redaksi

Dini Suciatingrum



Pelatihan Jurnalistik Feminis di Jakarta (dok. Aksi! for gender, social, and ecological justice)

Ketimpangan ekonomi membuat banyak perempuan masuk dalam kelompok miskin dan sekaligus menghadapi ketidakadilan gender, yang memicu terjadinya feminisasi kemiskinan.

Direktur Eksekutif Aksi! for gender, social, and ecological justice, Titi Soentoro mengatakan, perempuan miskin tidak memiliki akses ke pengambilan keputusan dan ke sumber-sumber kehidupan, akibat pembangunan ekonomi Indonesia yang berlandaskan investasi asing, utang luar negeri, dan perdagangan internasional sejak rezim Orde Baru sampai saat ini.

Model pembangunan pertumbuhan ekonomi ini terus bertumpu pada eksplorasi sumber daya alam dan manusia, sehingga makin banyak perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.

"Fenomena ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan gender yang memicu feminisasi kemiskinan tidak banyak menjadi perhatian publik. Karenanya, kita butuh banyak jurnalis perempuan yang memiliki komitmen pemberitaan untuk ikut memperjuangkan hak perempuan demi kehidupan yang lebih baik dan adil," ucap Titi dalam keterangannya, Kamis (2/11/2023).

Menyuarkan Suara Perempuan yang Hidup Miskin dan Terpinggirkan



Direktur Eksekutif Aksi! for gender, social, and ecological justice, Titi Soentoro (dok. Novel Basente)

Aksi! for gender, social, and ecological justice bekerja sama dengan Konde.co melakukan pelatihan jurnalistik feminis ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan gender untuk mengisi kebutuhan tersebut.

Pelatihan ini diikuti 20 perempuan, terdiri dari jurnalis, aktivis, dan perempuan komunitas dari Maluku, Ambon, Jakarta, Bali, Makassar, Kalimantan Tengah, Papua, dan Bengkulu.

"Kegiatan dilakukan untuk memperkuat pemahaman aktivis dan jurnalis mengenai realitas pembangunan di Indonesia, ketimpangan ekonomi serta feminisasi kemiskinan, dengan menggunakan analisis feminis dan mendorong solidaritas serta komitmen untuk bersama-sama menyuarakan suara perempuan yang hidup dalam kondisi miskin dan terpinggirkan," paparnya.

Pembangunan Waduk Pluit Buat Warga Krisis Air



Pembangunan Tanggul Teluk Jakarta (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Sementara itu, Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia, Muhayati mengatakan, pembangunan tanggul raksasa untuk mencegah banjir rob akibat perubahan iklim, nyatanya malah membuat nelayan makin sulit mendapatkan ikan, merusak lingkungan, menggusur tempat tinggal, menghilangkan mata pencaharian, dan mengakibatkan krisis air bersih.

"Air bersih merupakan salah satu kebutuhan mendasar kami. Tempat tinggal saya, sangat sulit untuk mendapatkan air bersih karena pembangunan Waduk Pluit. Kami harus mengeluarkan uang sekitar Rp20 ribu sampai Rp30 ribu per hari. Saya berharap, setelah pelatihan ini jurnalis dan media dapat memberitakan krisis air bersih yang dihadapi oleh perempuan di Jakarta," harap Muhayati.

Ketimpangan Ekonomi dan Ketidakadilan Gender Jadi Isu Prioritas di Ruang-Ruang Redaksi



Perempuan pengupas kerang di Muara Angke, Jakarta Utara, Senin (30/10/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Untuk meningkatkan keterampilan peliputan mendalam dan ketidakadilan berlapis yang dihadapi perempuan, para peserta berkunjung ke Kalibaru, Rawa Badak, Muara Angke dan Muara Baru di wilayah Jakarta Utara.

"Kegiatan seperti ini sangat penting dan perlu untuk meningkatkan pengetahuan jurnalis mengenai feminism. Ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan gender harus bisa ditulis dan menjadi isu prioritas di ruang-ruang redaksi. Jurnalis perlu melihat lebih mendalam sebab dan akibat pemiskinan yang dialami oleh perempuan akar rumput di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan," kata Sunarti Sain, jurnalis Radar Selatan.

Wujudkan Keadilan Bagi Perempuan yang Selama Ini Kurang Disuarakan



Pelatihan jurnalistik feminis (dok. Novel Basente)

Pelatihan ini juga menghadirkan beberapa narasumber yang memiliki pengalaman mengenai strategi peliputan mendalam, dengan melihat sebab-akibat feminisasi kemiskinan. Mereka di antaranya adalah Ahmad Arif, anggota harian Kompas dan pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ati Nurbaiti, Ketua AJI periode 2002-2003 dan salah seorang pendiri Perserikatan Solidaritas Perempuan.

“Melalui pelatihan ini, saya berharap akan memperkuat pemberitaan di media dan turut mendukung advokasi yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan komunitas yang selama ini kurang disuarakan,” ujar Rori Marwani Subaing dari Lembaga Pengkajian dan Penguatan Kapasitas, Papua.

Beban Kerja Perempuan Bali di Kala Hujan Berlipat Ganda

Perempuan selalu banyak dibebankan oleh tugas domestik

Ayu Afria Ulita Ermalia

Musim hujan selain memiliki potensi ancaman terhadap bencana alam, juga berdampak kepada beban kerja, serta keselamatan perempuan. Beberapa perempuan pekerja di Kota Denpasar ini lantas berbagi kisahnya kepada IDN Times. Bahwa beban kerjanya di rumah dan luar semakin berlipat ganda. Berikut ini kisah selengkapnya.

Beban untuk Membersihkan Rumah Menjadi Bertambah

Triwidianti (41) merasa beban kerjanya di rumah semakin bertambah dengan datangnya musim hujan. Ibu sekaligus pekerja swasta ini lebih banyak mengerjakan seluruh pekerjaan domestik secara sendirian seperti membersihkan rumah, hingga mencuci pakaian. Apalagi suaminya bekerja ke luar negeri. Ia harus menjadi ibu siaga untuk mengurus dua orang anaknya, termasuk sang ayah mertua.

Triwidianti mengungkapkan, setiap musim hujan tiba, tidak ada yang memperbaiki atap rumah di saat mengalami kebocoran. Rumah yang ditinggalinya tergenang air bila hujan tiba. Sehingga memerlukan waktu dan tenaga ekstra untuk membersihkan rumah sebelum berangkat bekerja. Kondisi itu pula yang membuat keluarga di rumah kesulitan untuk mengakses sumber air bersih.

"Kendala yang saya hadapi banjir, dan genangan air dapat membuat akses ke sumber daya penting seperti air bersih menjadi sulit," kata perempuan asal Kecamatan Denpasar Baratini, pada Selasa (5/12/2023).

Persiapan Menuju Lokasi Kerja Menjadi Lebih Ribet

Tidak jauh berbeda dengan perempuan yang tinggal di Kecamatan Denpasar Timur, Putu Sinta Lestari (29). Musim hujan selalu membatasi dirinya untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Persiapan yang diperlukan menjadi lebih banyak agar bisa sampai kantor, tempatnya bekerja. Apalagi menggunakan kendaraan roda dua.

Berangkat kerja harus memakai sandal, celana dilipat, memakai jas hujan agar pakaianya tidak kotor dan basah. Mungkin itu hal yang biasa, namun sebenarnya meribetkan. Ia harus tiba di kantor dalam keadaan bersih. Badan, pakaian, dan sepatunya harus kering sempurna agar tidak berbau selama di kantor. Jika basah, pasti memakan waktu lama untuk mengeringkannya. Sementara, ia harus bekerja on time di kantor.

Belum lagi beban kerja rumah tangga. Apabila hujan berlangsung lama dan rutin, maka kondisi atap rumah yang ditinggalinya sering mengalami kebocoran. Ia harus menggeser beberapa barang agar terhindar dari tetesan air hujan. Kemudian mengelap lantai yang terkena tetesan air.

"Sementara solusinya hanya mengganti ring penyangga genteng rumah. Hanya saja saya belum cukup punya dana untuk memperbaikinya," jelasnya.

Musim Hujan Berisiko Bagi Pekerja yang Memakai Kacamata

Sedangkan Khania (20) yang tinggal di Kecamatan Denpasar Selatan mengaku cuciannya menjadi lebih banyak di musim hujan. Dari yang biasanya pakaian basah bisa kering dalam satu atau dua hari, sekarang harus menunggu berhari-hari dan menjadi lebih lama. Sehingga menambah beban keuangan untuk menyelesaiannya.

"Jadi bertambah banyak, dan harus mengeluarkan biaya lebih untuk *laundry*," ungkapnya.

Sebagai perempuan berkacamata, ia harus menghadapi perasaan waswas selama berkendara di jalan raya. Karena pandangannya terhalang kacamata minus yang berembun. Kondisi ini semakin berisiko ketika ia harus menempuh perjalanan jauh untuk urusan pekerjaan.

Tuntutan pekerjaan di luar ruangan juga lebih lama dikerjakan karena situasi ini. Faktor keselamatan dalam perjalanan menjadi pertimbangan tersendiri, karena beberapa jalan yang dilalui berlubang, dan tidak rata.

Ditambah, jika tengah menstruasi semakin membuatnya tidak nyaman. Ia harus menyiapkan beberapa pakaian atau sepatu pengganti untuk dibawa ke tempat kerja.⁴ Beban kerja laki-laki tidak terpengaruh musim hujan.

Sementara itu laki-laki yang tinggal di Kecamatan Denpasar Selatan, Ferry (34), mengaku musim hujan tidak membawa pengaruh besar terhadap beban kerjanya. Karena selain bekerja di lapangan, ia kerap membantu istri untuk menyelesaiannya pekerjaan rumah tangga. Sisa waktunya kemudian digunakan untuk hal lain yang lebih produktif.

"*Nggak* pengaruh sih. Tergantung produktivitasnya kita seperti apa," katanya.

Cerita-cerita mereka memang sederhana dan sepele. Namun gambaran itu memperlihatkan ada stereotip terhadap perempuan, bahwa ruang geraknya hanya di wilayah domestik saja dan menerima beban ganda dalam rumah. Apakah ini bentuk diskriminasi?

Kemegahan Makassar New Port Hilangkan Ruang Hidup, Lahirkan Kemiskinan Nelayan Perempuan

Proyek Strategis Nasional (PSN) Makassar New Port merampas ruang hidup nelayan perempuan.

Chaerani



Warga Kampung Manggara Bombang, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo saat mengolah hasil laut. (Dok. Chaerani/Republiknews.co.id)

Ibu Syamsiah, siang itu mengenakan daster selutut berwarna orange. Di lengan kanan dasternya berlogo Fendi dengan bentuk memanjang mengitari ketiak. Meski itu adalah salah satu brand fashion ternama, Saya memastikan daster yang dikenakannya adalah produk tiruan (KW).

Kedatangan saya siang itu rupanya sedikit mengganggu waktu tidurnya. Sebab saat memasuki rumah kayu miliknya, ia sedang berbaring bersama anak peremuannya berusia sekitar 5 tahun.

Rumah Ibu Syamsiah yang berlokasi di Kampung Manggara Bombang, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo sangat sederhana. Berdingin seng dengan lantai semen. Di dalamnya terdapat kursi plastik, dan satu sofa panjang model zaman dulu yang telah nampak lusuh.

Dua lemari tua tersusun di samping sofa, saya memastikan lemari kayu itu usianya lebih tua dari Saya.

"Ya beginilah aktivitas saya saat ini setelah tidak bisa lagi turun melaut. Saya merasa semakin banyak masalah, apalagi dari segi pemasukan," katanya sambil memperbaiki duduknya.

Ibu Syamsiah adalah satu dari ratusan perempuan nelayan yang terdampak dari pembangunan Pelabuhan Makassar New Port (MNP) yang dibangun PT Pelindo IV Makassar. MNP ini masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), dan telah diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada Kamis, 22 Februari 2024. Pelabuhan ini diklaim akan menjadi hub terbesar sekaligus meningkatkan efisiensi biaya logistik di Indonesia Timur.

Kemegahan MNP yang menelan anggaran sekitar Rp5,4 triliun ini, rupanya merampas mata pencaharian perempuan nelayan yang ada di wilayah pembangunan. Salah satunya wilayah tempat Ibu Syamsiah tinggal.

Hilangnya mata pencaharian dari hasil melaut mengorbankan dua anaknya. Mereka terpaksa putus sekolah, sebab tak sanggup membayar biaya pendidikan. Saat itu, ia mendaftarkan tiga anaknya pada jenjang SD dan SMP untuk periode penerimaan siswa baru tahun 2021 dan 2022.

"Dua anak saya harus putus sekolah karena tidak bisa kami bayar uang seragamnya. Itu nilainya Rp400 ribu satu anak, bayangkan kalau tiga anak mau saya sekolahkan," katanya.

"Ada juga anak saya SMP kelas 2, sampai sekarang belum bisa kami bayar SPP-nya, makanya tertunggak, akhirnya tidak masuk sekolah," jelasnya lagi.

Kurangnya pendapatan ekonomi Syamsiah dirasakan setelah ia beralih profesi dari nelayan menjadi seorang pemulung gelas plastik. Pekerjaan ini ia pilih setelah dirinya memutuskan untuk berhenti melaut. Saat itu tidak ada lagi hasil laut yang bisa dijual. Di laut bekas reklamasi hanya menghasilkan lumpur, minyak, dan sampah. Sehingga habitat laut pun mati.

Dari hasil memulungnya selama tiga minggu, ia dapat menghasilkan 3 karung gelas plastik. Jumlah ini ketika ditukar ke pengumpul hanya dibayar Rp30 ribu. Pendapatan ini tentunya sangat berbeda saat masih melaut, Syamsiah bisa menghasilkan Rp150 ribu sekali melaut dengan durasi waktu setengah hari.

Penghasilannya bersama suaminya sebagai tukang ojek konvensional tentunya sangat kurang untuk membiayai kehidupannya bersama enam orang anaknya, dari 10 bersaudara.

"Sangat kurasakan kurangnya pemasukan sekarang, dulu kalau Saya dan bapak, dibantu anak-anak turun melaut bisama beli makanan, sisanya ditabung untuk sekolahnya anak-anak. Sekarang untuk makan saja susah," katanya dengan suara parau.

Dalam kehidupan sehari-harinya, Syamsiah memang menggantungkan hidupnya pada hasil tangkap di laut. Ia bersama suaminya sehari-hari menangkap hasil laut seperti Kanjampang (Kerang) dan Tude'.

Menjadi seorang nelayan juga bukan baru pertama kali dilakoninya. Syamsiah yang lahir pada 1997 lalu berasal dari orangtua nelayan. Melakukan aktivitas di laut adalah kebiasaan yang sangat disenanginya, di samping memang telah menjadi mata pencarian utama.

Beban ekonomi yang dirasakannya juga pernah membuat ia ingin mengakhiri hidupnya. Hampir tiga kali Ia mencoba ingin bunuh diri, merasa tak kuat menanggung beban yang dianggapnya sangat berat.

"Saya selalu merasa bunuh diri jalan keluarnya. Tidak sanggup kadang, hancur ku rasa. Ada anak mau belanja tidak ada uang, bapak pemasukannya juga kadang Rp25 ribu *ji* sehari, *na mauki* makan, *mauki* belanja ini dan itu," cerita Syamsiah dengan mata berkaca.

Beberapa kali ia terpaksa menjual isi-isи rumahnya, hanya untuk sebatas membeli keperluan bahan pokok.

"Habis semua. Piringku, mangkokku, kulkasku, televisiku Saya jual semua. Mau *ki* makan tidak ada uang, anak mau bayar sekolah juga, betul-betul susah sekali hidupku setelah ada ini reklamasi," katanya lagi.

Saat ini Syamsiah menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai pemulung plastik, buruh kasar, dan berbagai tawaran pekerjaan lainnya. Ia lakukan hanya untuk memperpanjang hidup bersama keluarganya.

Dari Seorang Nelayan Menjadi Buruh



Aktivitas melaut nelayan perempuan kian sepi usai pembangunan MNP dilakukan di Kecamatan Tallo. (Dok. Chaerani/Republiknews.co.id)

Pilihan untuk berganti pekerjaan dari seorang nelayan ke buruh kasar menjadi pilihan yang mau tidak mau, suka tidak suka dipilih masyarakat akibat pembangunan MNP ini. Terutama perempuan.

Saenab, warga RT1 RW 2 Kampung Manggara Bombang harus memilih menjadi seorang *cleaning service* di salah satu perusahaan pergudangan di Makassar agar tetap bisa membantu menghasilkan nafkah tambahan bagi keluarga.

Ia memilih menjadi buruh di perusahaan sebab hasil laut di wilayah tangkapnya tak lagi menjanjikan seperti sebelum dilakukannya reklamasi pembangunan MNP. Kondisi ini tentunya mengurangi pendapatan keluarganya. Apalagi saat itu Ia masih menyekolahkan ketiga anaknya.

"Saya hanya tahan bekerja 8 bulan, karena memang kami lebih terbiasa bekerja di laut ketimbang di perusahaan," kata Saenab.

Tidak sedikit juga masyarakat memilih untuk mencari pekerjaan di luar Makassar dengan merantau ke daerah atau kota lainnya.

"Ada yang ke Morowali, Palopo, bahkan ada ke Papua, di sana ada yang sebagai nelayan ada juga buruh. Mereka ikut keluarga, banyak laki-laki," terangnya.

Sebelum pembangunan MNP dilakukan, nelayan laki-laki fokus menangkap rajungan (kepiting), sementara nelayan perempuan menangkap kerang, tude, hingga ambari. Tapi semenjak pembangunan dilakukan sejumlah hasil tangkap perlahan hilang dan mati. Seperti ambari yang kata Saenab tidak lagi ditemukan di laut Tallo.

Dirinya mengaku, nelayan perempuan sangat berkontribusi dalam membantu perekonomian keluarga. Saenab misalnya, dengan penghasilan suami sebagai seorang buruh bergaji Rp75 ribu tentunya tidak akan cukup membiayai kebutuhan hidup. Tetapi dari hasil melaut Ia bisa hidup dengan berkecukupan.

"Gaji suami itu hanya cukup di dapur, jadi pendapatan dari hasil laut saya gunakan untuk biaya pendidikan, atau hajatan keluarga. Sekarang sudah susah kami penuhi," katanya.

Selain Saenab, ada lebih 400 masyarakat dari Kelurahan Buloa, Cambayya, hingga Tallo terdampak perampasan hak hidup akibat pembangunan MNP. Beberapa adalah kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

"Khusus di wilayah kami ini saja ada sekitar 100 perempuan yang terdampak," katanya.

Sebabkan Kemiskinan Meningkat

Koordinator Program Aksi! for gender, social, and ecological justice Risma Umar mengungkapkan, Program Strategis Nasional (PSN) yang dibangun pemerintah seperti Pembangunan MNP hanya menggusur ruang hidup dan menghadirkan kemiskinan.

"Bahkan juga melahirkan ketidakadilan gender bagi perempuan nelayan yang sumber penghidupannya dari hasil laut," ungkapnya.

Kata Risma, dalam periode lima tahun terakhir peningkatan kemiskinan dianggap mengkhawatirkan. Berdasarkan data per Maret 2023, jumlah kemiskinan di Sulsel mencapai sekitar 788 ribu jiwa. Sementara, khusus jumlah kemiskinan di Kota Makassar mencapai 74 ribu jiwa.

“Di data tersebut juga ada sekitar 1.000 lebih miskin ekstrem yang ada di Makassar. Selain itu dari data kemiskinan ini banyak kepala keluarga adalah perempuan,” katanya di sela-sela Dialog Multi Pihak bertajuk “Mengakhiri Ketimpangan Ekonomi dan Ketidakadilan Gender dengan Memberikan Pengakuan dan Akses Atas Ruang Hidup, Perlindungan Sosial dan Kerja Layak Bagi Perempuan di Sulawesi Selatan”.

Kondisi kemiskinan tersebut bukan hanya imbas dari pandemi Covid-19, tetapi disebabkan dari kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi ruang akses masyarakat miskin untuk memperbaiki kesejahteraannya.

Ia mencontohkan, pada UU Cipta Kerja yang melahirkan banyak macam kebijakan yang menutup akses dan memiskinkan masyarakat. Dimana, buruh industri yang merasakan betul dampaknya, seperti upah kerja hanya dihitung per jam, sehingga mematikan pendapatan mereka, bahkan ini diluar dari outsourcing dan lainnya.

“Jadi bukan hanya imbas dari Covid-19, tetapi kebijakan untuk menggusur tempat tinggal dan menggusur ruang hidup dan banyak hal lainnya. Belum lagi rata-rata perempuan yang paling rentan terdampak, sebab dipengaruhi konstruksi juga karena mereka tidak pernah dihitung, tidak pernah dianggap, dan lainnya,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga kerap kali menjadikan bantuan sosial sebagai solusi dalam mengatasi kemiskinan. Sementara, ia melihat bantuan sosial tidak menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan, justru menciptakan ketergantungan atau kehilangan kemampuan daya kritis masyarakat untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

“Hampir bantuan itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi mestinya pemerintah untuk mengurangi peningkatan kemiskinan yang ada mesti mengkaji ulang efektivitas bantuan tersebut karena dalam banyak kasus bantuan ini dipolitisasi,” tutup Risma.

Ganti Rugi Tak Menjawab Kebutuhan Dasar

Saenab mengatakan, PT Pelindo IV Makassar sebagai pihak yang mengelola Makassar New Port memang ingin melakukan ganti rugi sebagai upaya tanggung jawab sosial. Hanya saja ganti rugi yang ditawarkan bukan menjadi kebutuhan mendasar masyarakat yang ada, terutama kelompok perempuan.

Program ganti rugi yang dicanangkan melalui program corporate social responsibility (CSR) PT. Pelindo IV Makassar kepada masyarakat terdampak adalah dengan sistem pembinaan menjadi pelaku usaha. Secara teknis satu kelompok usaha terdiri dari 10 orang perempuan. Mereka kemudian diberikan modal untuk mengembangkan usaha tersebut. Program lainnya

adalah pemeriksaan kesehatan gratis yang dinilai bukan menjadi kebutuhan masyarakat sekarang ini.

"Buat apa pemeriksaan kesehatan sementara kami sudah dijamin dalam KIS, belum lagi ada bantuan sosial lainnya dari pemerintah yang sudah kami dapat. Makanya kami butuh ganti rugi itu yang betul-betul kami butuhkan," tegasnya.

"Terus mau dibuatkan pembinaan kelompok usaha, ini kami nilai akan mendatangkan konflik baru bagi kami masyarakat di sini. Makanya hingga hari ini semua bentuk ganti rugi kami tolak," tegas Saenab.



Pembangunan Pelabuhan MNP menyebabkan rusaknya habitat laut di pesisir Tallo. (Dok. Chaerani/Republiknews.co.id)

Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP-Anging Mammiri Suryani mengatakan, kebijakan pemerintah hari ini dalam hal tata kelola kota dibuat dengan menyesuaikan pembangunan proyek yang telah berjalan.

"Jadi seolah-olah peraturan ini disesuaikan dengan proyek-proyek yang berjalan. Belum lagi saat mencanangkan kebijakan masyarakat yang seharusnya menjadi pihak utama yang dilibatkan justru tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan, hasilnya mereka lah yang bertanggung jawab, dan terdampak," katanya.

Menurutnya, langkah pemerintah dalam membangun sebuah kota termasuk di Makassar, perlu diapresiasi. Hanya saja harus dapat menghindari lahirnya ketimpangan-ketimpangan baru yang justru dialami oleh masyarakat kecil.

Akademisi Universitas Sawerigading Makassar Rahma Amin mengungkapkan, dalam kajian ekofeminisme melihat perempuan dan alam memiliki kesamaan sebagai sumber penghidupan, karena kemampuannya memproduksi kehidupan. Sehingga jika ruang hidup digusur, lingkungan dirusak, maka secara simbolik keberlangsung hidup perempuan juga akan berpengaruh.

Selain itu, perempuan menjadi orang paling terdampak secara ekonomi dari penggusuran ruang hidup dengan melihat kondisi geografis Indonesia, termasuk di Sulsel. Ini disebabkan karena banyak perempuan secara ekonomi masih bergantung pada kehidupan yang agraris ataupun mereka yang hidup di pesisir dan mengandalkan sumber alam yang ada di laut.

"Mereka (Perempuan) secara ekonomi terlibat langsung dalam proses pengelolaan, ataupun membantu suami mereka. Ketika ruang-ruang hidup mereka dirampas, bukan hanya sumber penghasilan mereka yang hilang tetapi akan menibulkan masalah-masalah baru bagi perempuan," kata Rahma.

Dosen Sosiologi Gender ini menilai, Makassar sebagai tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai latar belakang untuk mencari peluang secara umum masih menghadapi berbagai tantangan terkait kesenjangan gender. Bahkan hingga saat ini Kota Makassar belum ramah pada perempuan.

"Kedepannya, pemerintah harus memulai kebijakan-kebijakan yang berdasar pada pengarusutamaan gender dan melibatkan perempuan dalam pembangunan, sekalipun banyak sekali produk materi hukum yang tidak mendukung adanya keterlibatan aktif perempuan, diskriminatif dan tidak adil gender," terangnya.

Tak Melibatkan Warga Langsung



Perempuan dan nelayan tradisional saat melakukan aksi protes terhadap pembangunan Pelabuhan MNP yang diresmikan Presiden RI Joko Widodo, di Depan Gardu Induk PLN Tallo, Kamis, (22/02/2024). (Dok. SP Anging Mammiri)

Suryani mengaku, selama proses advokasi yang dilakukan tak hanya menempuh aksi-aksi penolakan, tetapi juga ruang-ruang dialog dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Pelindo Region IV Makassar, hingga ke pemerintah daerah yang dilakukan Komisi D DPRD Sulsel waktu itu.

Hanya saja dari ruang dialog tersebut, meski melahirkan sejumlah kesepakatan tetapi tidak terakomodir dengan baik. Salah satunya, saat Komisi B DPRD Sulsel menyepakati akan melakukan komunikasi dengan pihak PT Pelindo Pusat bersama perwakilan nelayan di Jakarta itu tidak dilakukan. Sehingga nelayan sebagai pihak yang dirugikan menolak hasil pertemuan antara Komisi B DPRD Sulsel dengan PT Pelabuhan Indonesia di Jakarta, karena tidak dilibatkannya mereka.

"Bahkan dalam pertemuan itu juga tidak membahas aspirasi dan yang menjadi tuntutan masyarakat sebagai korban," jelasnya.

Melihat ketidakberpihakan pemerintah ini, SP-Anging Mammiri sebagai organisasi yang ikut mendampingi kemudian mengadukan ke Komnas HAM RI, hingga Komnas Perempuan RI.

Dari aduan itu, pada 2022 lalu Tim Komnas HAM kemudian turun melihat langsung kondisi lapangan melalui indikator pelanggaran HAM. Sama halnya dengan Komnas Perempuan, hasil tinjauan lapangan yang dilakukan kemudian melahirkan sejumlah rekomendasi untuk DPRD Provinsi Sulsel agar segera membahas dan memprioritaskan penyelesaian masalah tersebut.

"Setelah rekomendasi itu keluar kami pun datang ke DPRD agar ditindaklanjuti segera. Tapi yang ada kami justru tidak diterima dengan baik, yang mana kami berharap bertemu langsung dengan Ketua DPRD Sulsel malah dialihkan ke Komisi C, padahal yang pertama kali mediasi kami itu adalah Komisi D," ujarnya.

Hingga hari ini perempuan pesisir yang terdampak pembangunan MNP masih terus berjuang menuntut keadilan agar pendapatan ekonomi mereka dapat kembali pulih seperti sebelum berdirinya pelabuhan megah tersebut.

Makassar New Port, Proyek Raksasa yang Menghilangkan Hak Masyarakat Pesisir dan Memiskinkan Nelayan Perempuan

Ketimpangan sosial, ekonomi, hingga gender terjadi sejak dimulainya proyek raksasa Makassar New Port. PSN justru menyengsarakan masyarakat pesisir, termasuk nelayan perempuan.

Sunarti Sain



(dok. RadarSelatan.co.id)

Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan pelabuhan baru di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Namanya Makassar New Port (MNP). Peresmian MNP dilakukan Jokowi pada 23 Februari 2024. Di momen International Women Day hari ini Jumat 8 Maret 2024, kami angkat kembali perjuangan perempuan pesisir yang tergerus dengan hadirnya pelabuhan baru bernama Makassar New Port.

MNP ini mengupgrade pelabuhan lama dari kapasitas 750Ribu menjadi 2.5 Juta TEUs per tahun. MNP menjadi pelabuhan dengan kapasitas terbesar setelah Tanjung Priok Jakarta.

Peresmian dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang hadir bersama para Menteri seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Setiyadi, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Jokowi menyebut bahwa Makassar New Port menjadi pelabuhan terbesar setelah Tanjung Priok di Jakarta.

Toh keberadaan MNP ini tidak melulu menjadi kabar baik bagi masyarakat pesisir yang sudah lama hidup dan mengantungkan kehidupannya pada laut.

Sejak awal rencana pembangunan mega proyek MNP, para nelayan pesisir di kawasan tersebut menolak dan melakukan aksi protes.

Bahkan saat peresmian pun sejumlah perempuan nelayan melakukan unjuk rasa terhadap peresmian pelabuhan Makassar New Port (MNP) oleh Presiden Jokowi di depan Gardu Induk PLN Tallo.

Penolakan terhadap pembangunan Pelabuhan MNP sebenarnya sudah dilakukan bertahun-tahun lalu. Tepatnya pada tahun 2017 oleh perempuan pesisir bersama nelayan tradisional di Kelurahan Cambaya, Buloa, Tallo, Makassar.

Aksi protes tersebut dikarenakan aktivitas pembangunan telah menghilangkan mata pencaharian nelayan, sumber pangan perempuan, pencemaran lingkungan, lumpur dampak dari transportasi alat-alat berat, sampah hingga limbah minyak.

Tidak hanya itu proyek MNP juga melahirkan ketimpangan sosial, ekonomi, dan ketimpangan gender.

Lebih mengenaskan lagi karena sejumlah perempuan nelayan yang melakukan aksi terhadap penolakan peresmian Pelabuhan Makassar New Port, mendapatkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan dengan mengambil secara paksa sejumlah poster yang dibentangkan oleh perempuan nelayan.

Ramlah, perempuan pesisir yang selama ini bersuara keras pada keberadaan MNP mengatakan sebelum adanya Makassar New Port, pekerjaan suaminya sebagai nelayan berjalan sangat baik. Kebutuhan keluarganya bisa terpenuhi dan tercukupi.

Namun setelah hadirnya MNP, mata pencaharian suami dan dirinya tergeser. Bahkan untuk mengakses air bersih saja mereka kesulitan. “Memang dulu pihak Pelindo sempat datang ke kami tapi hanya untuk tanya-tanya. Tidak ada solusi sampai sekarang. Awalnya kami dijanjikan air bersih ternyata tidak ada air bersih untuk nelayan,” ungkapnya.

Ramlah berharap tidak ada pembangunan maupun reklamasi yang mengubur mimpi-mimpi mereka. "Kami hanya mau pemulihan hak. Kami tidak butuh CSR," tegasnya.

Bagi para nelayan, menyuarakan kegelisahan mereka pun kini nyaris tak mampu lagi. Saat aksi unjuk rasa di momen peresmian MNP, sejumlah nelayan diintimidasi.

Situasi ini menurut Ifha dari Solidaritas Perempuan Anging Mammiri merupakan bentuk pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di depan umum sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang. "Sampai hari ini ada 150 perempuan nelayan masih terus berjuang mempertahankan ruang kelolanya di pesisir yang terdampak proyek MNP. Pelanggaran hak perempuan telah diadukan kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan Republik Indonesia, namun belum ada titik terang penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak perusahaan," papar Ifha. Menurutnya, berbagai upaya telah ditempuh perempuan pesisir dan nelayan tradisional dalam mencari keadilan atas ruang hidup mereka di pesisir. Termasuk bertemu dengan pihak perusahaan (Pelindo), berdialog dengan pemerintah Gubernur Sulsel, Pemerintah Kota Makassar, Komisi E, Komisi B, Komisi C, Sekretaris DPRD Provinsi Sulsel.

Dalam berbagai ruang dialog Perempuan pesisir dan nelayan tradisional menyampaikan tuntutannya yakni mendesak pemerintah dan perusahaan memulihkan hak ekonomi dan pemulihhan hak atas lingkungan. Bahkan RDP yang dilakukan pada tanggal 24 Januari 2023, pemerintah DPRD dan Perusahaan PT. Pelindo IV bersepakat untuk bersama-sama ke Jakarta bertemu dengan PT.Pelabuhan Indonesia membicarakan persoalan ini.

Namun lagi-lagi Komisi B beserta pihak perusahaan mengabaikan hasil kesepakatan tersebut. "Komisi B bertemu dengan PT.Pelabuhan Indonesia di Jakarta tanpa melibatkan perwakilan perempuan dan nelayan," kata Ifha yang tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.

Ketidakpatuhan atas hasil RDP dan ketidakseriusan pemerintah menyelesaikan persoalan perempuan disebutnya sebagai pengabaian terhadap hak-hak perempuan.

Terlalu banyak kerugian yang dialami masyarakat khususnya perempuan nelayan. Aktivitas reklamasi Pembangunan Pelabuhan MNP berdampak pada hilangnya pekerjaan perempuan pencari kerang, kanjappang dan mengurangi pendapatan nelayan tradisional. Perempuan harus bekerja dan berpikir ekstra untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarga. Terlebih karakteristik laut yang diidentikkan dengan maskulinitas, sering kali dianggap sebagai ranah yang tidak mungkin menjadi wilayah kelola perempuan.

Akibatnya perempuan tidak pernah dilibatkan dalam proses konsultasi, tidak diakui identitas sebagai nelayan meski secara turun temurun memanfaatkan pesisir sebagai ruang kelola. Perempuan nelayan tidak menerima program pemberdayaan, kartu asuransi nelayan sementara mereka beraktivitas di laut sama seperti nelayan laki-laki.

Menurut Suriani, Ketua SP Anging Mammiri, skema Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai Upaya Sentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, melalui Peraturan Presiden Nomor 109/2020 merupakan aturan yang berorientasi pada pembangunan ekstraktif dan infrastruktur. Rentetan persoalan agraria dan lingkungan hidup timbul akibat PSN sehingga berdampak buruk pada kehidupan rakyat. Salah satunya Proyek Pelabuhan Makassar Newport (MNP) yang telah memiskinkan perempuan pesisir dan nelayan tradisional di pesisir Makassar. “Peresmian pelabuhan MNP oleh Presiden Joko Widodo, bentuk nyata pengabaian negara terhadap pemenuhan dan perlindungan hak asasi perempuan pesisir dan nelayan tradisional. Aksi penolakan dan protes yang disuarakan oleh perempuan pesisir merupakan bentuk kekecawaan dan kemarahan perempuan nelayan yang selama ini memperjuangkan hak atas ruang lautnya. Kami mengecam segala bentuk intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan dengan dalih apapun. Menyampaikan pendapat di depan umum adalah hak setiap warga negara, termasuk perempuan nelayan,” tegas Suryani, Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP Anging Mammiri.

Puluhan Tahun Sulit Akses Air, Perempuan di Kedisan Mulai Bergerak

Air Bersih dan Sanitasi Layak masuk dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs). Di sisi lain, masyarakat Konyel di Desa Kedisan, Bali, masih kesulitan mengaksesnya. Hal itu menggerakkan para perempuan di Kedisan untuk berbuat sesuatu.

Ni Luh Putu Wahyuni Sri Utami



(dok. pribadi)

“Saya pasrah dengan keadaan, tidak pernah membicarakan persoalan akses air kepada pihak siapa pun.”

Kata-kata tersebut terlontar dari seorang perempuan saat saya pertama kali datang ke kediannya di Lingkungan Konyel, Subak Taksu, Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Saat itu awal tahun 2023; seharusnya di era yang serba modern dan canggih ini, akses air bersih tak lagi menjalani persoalan. Terlebih di Pulau Bali, destinasi utama dunia. Namun begitulah kenyataannya. Masyarakat Konyel yang tinggal hanya terpaut 15 menit dari pusat wisata Kintamani, perlu berjalan berjam-jam melewati medan terjal untuk mendapatkan air. Terputusnya akses air bersih telah menyulitkan mereka selama bertahun-tahun.

Sangat jelas bahwa air merupakan sumber kehidupan dan kebutuhan mendasar masyarakat agar mereka dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif serta meningkatkan kesejahteraan. Dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pun, Air Bersih dan Sanitasi Layak tercantum sebagai target nomor 6. Agenda SDGs pada tahun 2030 adalah meraih semua target tersebut dapat, termasuk memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi berkelanjutan secara

universal. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai upaya meningkatkan kualitas air, mengelola sumber air terpadu, melindungi dan memulihkan ekosistem air, memperluas kerja sama dan dukungan internasional, serta memperkuat partisipasi masyarakat lokal.

Namun apakah dengan tercapainya target SDGs nomor 6 itu, kehidupan para perempuan di Kedisan juga akan langsung berubah?

Data global dari PBB hingga tahun 2022 menunjukkan, sebanyak 2,2 miliar orang masih kekurangan akses air bersih. Bahkan, lebih dari 3 miliar orang belum memiliki akses ke sanitasi. Di Indonesia, sesuai catatan data dari World Health Organization (WHO) dan beberapa studi internasional, hingga tahun 2022 sekitar 60,1% dari populasi baru memiliki akses ke air bersih atau masih ada 35,3 juta orang di Indonesia tidak memiliki akses ke air bersih. Mayoritas masyarakat yang tidak memiliki akses ke air bersih tinggal di daerah pedesaan; ini menjadi sebuah tantangan yang sangat besar.

Secara statistik pun, masih terdapat banyak daerah di Indonesia yang berada di bawah angka rerata nasional dalam hal kualitas air dan ketersediaan air bersih. Kualitas air sangat beragam. Bappenas mencatat, Bali termasuk sebagai satu di antara beberapa daerah selain NTT, Jambi, Jateng, Bengkulu, dan DKI Jakarta, yang masih berjibaku dengan kualitas air yang tidak terlalu baik. Pemberian kualitas air akan sangat membantu ketercapaian akses air bersih yang lebih baik.

Meskipun data-data tersebut menyiratkan kondisi kelabu dan seolah tak ada peluang masa depan yang lebih cerah, tapi pasrah tentu seharusnya bukan pilihan. Saya meyakini, langkah kecil apa pun yang dilakukan kelak akan memberi dampak besar. Bersama tim Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Centre (LBH BWCC), kami mencoba memulai dengan hal paling sederhana. Yakni mengajak para perempuan di Konyel, Desa Kedisan untuk bicara bersama. Harapannya, dari obrolan kecil itu, muncul kesadaran bahwa mendapatkan akses air bersih dan sanitasi adalah hak mereka, serta ada cara untuk menyuarakannya dan berjuang bersama.



Lalu pada pertengahan tahun 2023, LBH BWCC mengadakan riset lanjutan sebagai bahan advokasi tentang akses air bersih dan sanitasi, khususnya melalui perspektif gender dan keadilan pembangunan. Hasil riset menemukan bahwa sebagian besar masyarakat lokal termasuk warga perempuan—secara khusus di lingkungan Taksu sebagai lokus riset—masih mengalami permasalahan atas akses air bersih. Beberapa faktor yang teridentifikasi menjadi penyebabnya antara lain faktor ekonomi yang kurang baik atau kemiskinan, akses ke sumber air yang sulit dijangkau karena medan yang ekstrim, kualitas air yang buruk, musim kering berkepanjangan, dan lainnya.

Ketiadaan air bersih kemudian memunculkan berbagai persoalan. Beberapa di antaranya, masalah kesehatan masyarakat, terganggunya ketahanan pangan, menurunnya standar kehidupan, hingga kerentanan kekerasan terhadap perempuan. Riset itu dilanjutkan dengan pertemuan bersama pemerintah lokal yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Bangli, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli, PKK Kabupaten Bangli, Camat Kintamani, PDAM Kabupaten Bangli, Perwakilan Bendesa Adat (Ketua Adat), Perwakilan Subak, Perwakilan Banjar, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan tentunya para perempuan dari Konyel, Desa Kedisan.

Dari pertemuan itu, diketahui kemudian bahwa terdapat 415 sumber air permukaan di Kabupaten Bangli dan baru sebagian kecil yang dimanfaatkan karena keterbatasan infrastruktur. Warga menjadi kesulitan mengakses air bersih karena tidak tersedia sarana pendukung (pipa dan sumur bersama), akses jalan rusak, akses sumber air yang jauh, biaya mahal untuk membeli alat atau sarana untuk mengakses air secara mandiri, atau membeli

air maupun mendaftar ke PDAM. Maka perlu dukungan berbagai pihak untuk memperluas akses air bersih.

Sebagian warga pun menggunakan penampungan air hujan seadanya alias tidak permanen; hanya terbuat dari terpal. Sedangkan sebagian lainnya tidak memiliki penampungan air, jadi mereka mencari air sendiri atau membeli air. Kualitas air yang rendah dan ketersediaan sarana sanitasi (MCK) yang belum layak juga menyebabkan persoalan lain, seperti stunting dan dampak kesehatan lainnya. Kerentanan kekerasan terhadap perempuan sebagai dampak dari kesulitan akses air bersih antara lain potensi KDRT hingga pelecehan seksual terhadap perempuan saat mencari air di sumber air yang jauh. Selain itu, pelibatan perempuan di tingkat adat, forum desa, dan musyawarah warga, perlu didorong dalam pengambilan keputusan untuk pemenuhan akses air bersih dan sanitasi yang layak.

Berangkat dari kondisi itu, akhirnya tercetus program Air untuk Kehidupan di Kedisan (Water for Life in Kedisan). Program ini dilaksanakan selama periode Februari hingga Agustus 2024 mendatang, diikuti pula dengan beberapa rangkaian kegiatan, seperti pembangunan atau konstruksi sarana air bersih, pelatihan terkait sanitasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta kampanye kepada publik tentang pemenuhan hak atas akses air bersih dan sanitasi sebagai kebutuhan dasar.

Mimpi para perempuan di Konyel sederhana, “Kami ingin agar suatu saat ada kran di rumah. Dari kran itulah, nanti ada air mengalir.” Impian itu akan segera bisa mereka wujudkan karena mereka tak lagi pasrah, tapi sudah mulai berani bergerak.

Tentang Penulis

Novemy Leo, atau yang akrab disapa Novel, adalah seorang jurnalis senior dan editor yang telah berkarier di dunia pers sejak tahun 1999. Lahir di Kupang pada 17 November 1974, Novemy mengawali karier jurnalistiknya di Harian Pos Kupang, dan hingga kini menjabat sebagai News Editor Online di media tersebut. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang ini telah meliput berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur dan pernah bertugas di Jakarta sebagai Editor Online Tribunnews.com. Ia juga aktif mengikuti berbagai pelatihan jurnalistik, HAM, serta isu-isu perempuan dan gender. Novemy adalah anggota PWI NTT sejak 1999 dan dikenal pula sebagai pelatih jurnalistik, pembuat konten, serta motivator untuk pelajar dan kalangan profesional. Di luar dunia kerja, ia gemar bermain musik dan berkebun.

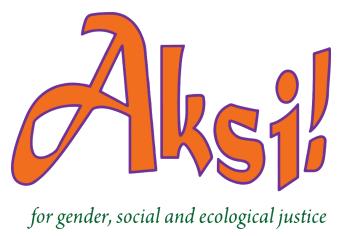
Dini Suciatingrum, adalah seorang jurnalis profesional yang telah aktif di dunia jurnalistik sejak 2012. Lahir pada 5 April 1987, Dini menempuh pendidikan di Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas IKIP PGRI Semarang. Karirnya dimulai di *Tribun Jateng* (Kompas Gramedia Group), sebelum bergabung dengan IDN Times pada 2019. Saat ini, ia meliput berbagai isu strategis nasional, termasuk kegiatan Setwapres, Pemprov DKI Jakarta, dan kementerian-kementerian terkait seperti Kemenko PMK, Kemensos, dan Kemenkes. Selain aktif di media, Dini juga pernah menjadi bagian dari Jaringan Jurnalis Perempuan Jawa Tengah (2015–2017). Ia berdomisili di Pondok Gede, Bekasi, bersama keluarga.

Ayu Afria Ulita Ermalia, lulusan Sarjana dan Magister di Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang, melalui program *fast track*. Sejak 2016, Ayu menekuni dunia jurnalistik dan saat ini bekerja sebagai jurnalis di IDN Times Regional Bali, setelah sebelumnya berkarier di Bali Express, Jawa Pos Group. Ayu dikenal aktif mengangkat isu-isu sosial, budaya, dan kemanusiaan melalui tulisan dan dokumenter. Beberapa karyanya antara lain dokumenter “Papa” (tentang pelecehan seksual oleh oknum sulinggih), “Korban Salah Tangkap Polisi, Nenek Pempin”, dan “Kisah Wayang Sakral Usia 200 Tahun di Bangli”. Ia juga meraih Juara 3 Lomba Karya Tulis Polresta Denpasar tahun 2022 dan turut terlibat sebagai notulis dalam acara C20 Side Event Climate Adaptive Financing.

Chaerani, seorang jurnalis perempuan yang berdomisili di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Lulusan Universitas Muslim Indonesia ini telah meniti karier jurnalistik sejak 2013 di berbagai media, seperti *Bisnis Sulawesi*, *Koran Sindo Makassar*, *Harian Amanah*, *Harian Saudagar*, hingga kini aktif sebagai jurnalis di Republiknews.co.id. Selain itu, ia juga merupakan pendiri dan pengurus Ruang Jurnalis Perempuan Makassar sejak 2021. Selama kariernya, Chaerani aktif mengikuti berbagai pelatihan jurnalistik, khususnya yang berfokus pada isu-isu perempuan, anak, lingkungan, hak asasi manusia, hingga keberagaman gender. Ia juga kerap menjadi peraih beasiswa dalam program peliputan mendalam dan residensi journalisme hukum dan antikorupsi.

Sunarti Sain, adalah jurnalis dan pemimpin redaksi yang telah meniti karier jurnalistiknya sejak 1996. Sunarti menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia, Makassar. Ia kini menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Harian Radar Selatan dan Dewan Redaksi Harian Fajar, setelah sebelumnya menjadi redaktur dan wartawan di berbagai media ternama. Selain aktif di media, Sunarti juga merupakan Trainer Google News Initiative (2017–2022), anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta terlibat dalam berbagai forum dan organisasi yang berfokus pada isu perempuan, media, dan film. Ia juga dikenal sebagai Executive Producer sejumlah film layar lebar seperti *Uang Panai*, *Silariang*, dan *Maipa Deapati dan Datu Museng*.

Ni Luh Putu Wahyuni Sri Utami, merupakan lulusan Manajemen dari Universitas Warmadewa, Bali. Kariernya beragam, mulai dari bidang keuangan dan administrasi, hingga terjun ke dunia jurnalistik sebagai reporter online di Tribun Bali, dengan fokus pada liputan kesehatan, ekonomi, dan isu-isu human interest. Selain pernah menjadi mitra survei di Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan Kota Denpasar, Wahyuni juga aktif memanfaatkan media sosial dalam aktivitas profesionalnya, termasuk saat bertugas sebagai admin dan marketing properti. Ia dikenal sebagai pribadi yang dinamis, teliti, dan penuh semangat dalam menjelajah berbagai bidang.



Aksi for gender, sosial, dan ecological justice terlibat secara kritis dalam perdebatan dan diskursus mengenai kebijakan pembangunan dan perubahan iklim untuk memastikan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, hak-hak perempuan, serta hak-hak masyarakat terdampak, serta mendukung aksi perempuan akar rumput untuk mewujudkan keadilan gender, sosial, dan ekologi.





for gender, social and ecological justice



Co-funded by
the European Union

